

Implikasi perdagangan barang dalam *ASEAN Free Trade* terhadap perdagangan
Intra dan Ekstra – ASEAN Tahun 2012

Dono Asmoro (151080089)

Penulisan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis akan sejauh mana pengaruh *ASEAN Free Trade Agreement* dalam perdagangan barang berdampak pada ekonomi negara anggota ASEAN antara tahun 2002 sampai dengan 2012 menurut pandangan liberal.

Pada tanggal 28 Januari 1992 disepakati perjanjian perdagangan bebas di ASEAN yang dikenal dengan *ASEAN Free Trade Agreement*. Didalam kesepakatan tersebut, seluruh anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan ekspor dan impor intra-ASEAN dari 0% hingga 5% sampai dengan tahun 2008 (dengan CEPT/ *Common Effective Preferential Tariff*).

Kemajuan ASEAN6 dalam menerapkan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) mendorong penetapan yang terhitung dari 1 Januari 2002 ASEAN6 akan melaksanakan *Free Trade*, sedangkan anggota ASEAN yang bergabung setelah 1992 akan menyesuaikan langkah melalui pengurangan tarif perdagangan intra-ASEAN menjadi 0% - 5% secara bertahap.

Tahun 2015 adalah visi dari *ASEAN Economic Community* (AEC) dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Penulis mengambil tahun 2012 sebagai batas penelitian dalam *Framework* ASEAN menuju AEC 2015.

ASEAN sebagai Organisasi Internasional di wilayah Asia Tenggara dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Dengan semangat menciptakan kesejahteraan serta keamanan regional, ASEAN di bentuk oleh 5 Negara pendiri yaitu; Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.¹

ASEAN tidak hanya menjadi organisasi politik, tetapi juga kerjasama ekonomi. Kesepakatan kelima negara dalam pelaksanaan ASEAN *Preferential Trading Arrangement* (PTA) pada 1977 menandai meningkatnya kerjasama ekonomi ASEAN. ASEAN *Preferential Trading Arrangement* adalah komitmen yang pertama kali dilakukan ASEAN untuk mendorong perdagangan intra-ASEAN.

Pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN.² Lima Negara pendiri ASEAN ditambah dengan Brunei Darussalam disebut dengan ASEAN6, sedangkan empat anggota lain yang bergabung setelah penandatanganan perjanjian ASEAN *Free Trade* sering disebut dengan ASEAN4 atau CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam).

Kemajuan yang diperlihatkan Singapura, Malaysia, dan Indonesia membuat pertemuan menteri ASEAN tahun 1994 mempercepat target tersebut lima tahun lebih awal, 2008 menjadi 2003. Pertemuan di tahun 1995, kembali mempercepat target 2003 menjadi 2002, khususnya bagi ASEAN6. Mulai dari tahun 2002 tarif 0-5 persen yang dicanangkan kepada ASEAN6 dan baru akan

¹ “Association of Southeast Asian Nation Overview”, <http://www.asean.org/asean/about-asean>, diakses 15 Maret 2012.

² “Sejarah, Tujuan, Kerja Sama & Keanggotaan ASEAN” <http://www.id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2174593-sejarah-tujuan-kerjasama-keanggotaan/>, diakses tanggal 09 Juli 2012

diterapkan kepada ASEAN4 secara bertahap. Target penurunan besaran tarif tersebut akan dapat dicapai Vietnam pada 2006, Laos dan Myanmar pada 2008, dan 2010 bagi Kamboja. Selanjutnya tarif impor intra-ASEAN akan dihapuskan sama sekali pada tahun 2010 untuk ASEAN6 dan 2015 untuk ASEAN4 melalui *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).³

Perdagangan internasional berkembang melalui mekanisme pasar yang memungkinkan negara dengan tingkat produksi tinggi dan bermutu dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar yang lebih luas. Keuntungan akan ditentukan oleh pasar sepanjang kegiatan perdagangan internasional tidak mendapat campur tangan negara.⁴

Kebijakan yang melakukan tekanan untuk menekan impor dan memaksimalkan ekspor mendorong negara membuat regulasi yang menyeleksi impor, hal ini yang disebut para ekonom dengan *barrier* atau hambatan sebagai bentuk proteksi. Hambatan dapat berupa tarif ataupun hambatan non-tarif. Pengenaan tarif akan membuat harga dari barang impor lebih tinggi daripada harga komoditas lokal. Hambatan non tarif atau *non-tariff barriers* (NTBs) sering ditemui dalam bentuk subsidi biaya, sertifikasi produk, regulasi yang menguntungkan produk domestik, agen atau importir milik pemerintah yang memonopoli komoditas perdagangan, *packaging*, *labeling* dan masih banyak lagi.⁵

³ *Ibid.*, hal.94-95.

⁴ Jill Steans & Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional; Perespektif dan Tema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal.103

⁵ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, hal.64-65

Free Trade di ASEAN dalam visi ASEAN 2015 membuat negara anggota ASEAN terus melangkah dengan berbagai kegiatan perdagangan intra-ASEAN. Sinisme dan dukungan tentu dihadapi masing masing pemerintah negara anggota dalam langkah realisasi visi ASEAN tersebut. Apa implikasinya terhadap perkembangan ekonomi regional? Hal tersebut yang dibahas penulis dalam skripsi ini.

Tujuan *Free Trade* di kawasan Asia Tenggara adalah untuk menciptakan suatu pasar dan landasan produksi tunggal dengan peredaran barang, modal dan jasa secara bebas yang memungkinkan ASEAN lebih kompetitif dalam perekonomian global. Liberalisasi perdagangan dalam *Free Trade* meniadakan campur tangan negara, menghapus hambatan dan mempermudah arus perdagangan barang, jasa, serta investasi.

Proses perkembangan kawasan ASEAN sebenarnya telah dimulai sejak kesepakatan PTA pada 1992 yang kemudian menuju tahap *Free Trade* dengan kesepakatan AFTA pada tahun 1992. Adanya CEPT menurunkan tarif perdagangan hingga 0 – 5 % secara bertahap mulai dari tahun 1993 yang direncanakan dapat menjadi 0% pada tahun 2010 bagi ASEAN⁶.

Free Trade di ASEAN menjadi solusi perdagangan terbaik guna mendorong perekonomian negara menjadi berkualitas dan mampu bersaing. Terbukti dengan kuatnya stabilitas ekonomi Asia Tenggara saat terjadi krisis ekonomi sejak akhir 2008 hingga 2009 yang dialami Amerika Serikat dan

⁶ “ASEAN Free Trade Area (AFTA)”, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-trade-area-afta-council>, diakses 21 Mei 2013

menggoyahkan perekonomian dunia. Buktinya transaksi perdagangan total ekstra maupun intra ASEAN di tahun 2010 dapat kembali stabil, bahkan melampaui jumlah perdagangan sebelumnya.

Penurunan kegiatan perdagangan di dunia akibat goyahnya nilai mata uang US Dollar pada 2008 tidak begitu mengusik Asia Tenggara seperti pada tahun 1998. Persiapan anggota ASEAN dalam penurunan tarif serta meniadakan hambatan membuat anggota ASEAN lebih siap menghadapi krisis pada akhir tahun 2008 - 2009. Walaupun perdagangan negara anggota ASEAN mengalami penurunan, pada tahun 2008 total perdagangan intra ASEAN mencapai \$ 470,112,360,221, kemudian anjlok menjadi \$ 376,177,604,511 pada 2009. Setelah keadaan perekonomian kembali normal pada tahun 2010 peningkatan jumlah perdagangan anggota (intra-ASEAN) lebih dari tahun sebelum terjadinya penurunan, yaitu \$ 548,419,017,721.⁷

Dalam proses menerapkan *Free Trade*, tiap – tiap negara mengalami respon, efek, serta kendala yang berbeda. Permasalahan HAM, demokrasi, kondisi ekonomi dan stabilitas nasional pasti dialami oleh negara anggota yang menyepakati untuk menjalankan *Free Trade* di wilayah Asia Tenggara.

Myanmar, politik luar negerinya di dominasi Junta Militer sejak 1988.⁸ Bergabung dengan ASEAN dan membawa Myanmar tergabung dalam AFTA

⁷ "Intra-ASEAN Trade 2008-2010", http://aseanstats.asean.org/Table.aspx?rxid=b24d99cb-309c-456a-8b3a-eef218d4431e&px_db=2-International+Merchandise+Trade+Statistics&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=2-International+Merchandise+Trade+Statistics%5c03.tables%5cIMTST01_YY-part2-2000-2011.px&layout=tableViewLayout1, diakses 20 Mei 2013

⁸ Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hal.157

merupakan langkah awal yang positif untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya yang sempat terpuruk. Hal ini diakibatkan oleh imbas pemerintah yang otoriter dan menutup diri dari pergaulan internasional. Melalui ASEAN dan dengan diterapkannya AFTA, Myanmar mulai membuka diri dan lebih mudah memperluas perdagangan dalam skala regional terkait usahanya untuk menarik investor. Kini, secara finansial Myanmar sudah mampu untuk mengeluarkan anggaran rutin untuk pembiayaan rapat tahunan ASEAN yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Brunei Darussalam , PDB yang tercatat pada tahun 2008 sebesar US \$ 14,780 dan laju pertumbuhannya sekitar 1,9 %. Brunei Darussalam sebagai Negara yang tidak begitu besar tetapi berhasil memainkan perannya dalam perdagangan dengan potensi minyak dan gas alam baik di kawasan Asia Tenggara dan juga Dunia.⁹

Kamboja menyesuaikan diri dengan perjanjian perdagangan bebas dalam kondisi ekonomi dalam negeri yang baru bangkit. Mata pencaharian warga Kamboja bukan dari industri akan tetapi sektor yang ditawarkan adalah bidang jasa dan pertanian tradisional, jadi hasil industri barang jadi Kamboja masih tergolong rendah. *Free Trade* bagi Kamboja yang sedang dalam rangka pembangunan yang positif di tahun 2008 terkena dampak cukup serius ketika terjadi krisis yang melanda Amerika dan menggoncang perekonomian dunia. Pada akhirnya kegiatan penurunan tarif transaksi perdagangan antar anggota (intra-ASEAN) yang sudah mendekati 0% dapat membantu Kamboja dalam kegiatan

⁹ “Brunei Industrial Development Authority”, <http://61.6.220.249/about Brunei-Brunei Economy.htm> diakses tanggal 26 November 2012

perdagangan untuk memulihkan ekonomi negaranya. Keterikatan perkembangan ekonomi negara anggota ASEAN dalam rangka AEC 2015 menjadi faktor pendukung stabilitas ekonomi Asia Tenggara dimana *Free Trade* menjadi salah satu instrument didalamnya.

Malaysia, Indonesia dan Singapura merupakan Negara yang siap dan dianggap sudah mampu untuk menjalankan *Free Trade*. Pertumbuhan Malaysia, Indonesia dan Singapura memiliki potensi untuk menjaga stabilitas ekonomi regional. Malaysia dengan pertumbuhan industri yang baik, Indonesia dengan potensi sumberdaya yang melimpah, dan Singapura yang merupakan negara ASEAN dengan angka perdagangan terbesar diantara anggota ASEAN membuat Asia Tenggara menjadi kawasan yang potensial. Dalam menanggapi kesepakatan ASEAN *Free Trade Area*, Singapura membuktikan diri sebagai negara anggota ASEAN yang paling siap dalam menghadapi perdagangan bebas. Indonesia menunjukkan daya tahan yang cukup baik di dalam menghadapi ekonomi global. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah lemah dalam menjalankan bisnis seperti buruknya infrastruktur, birokrasi yang tidak efisien, keterbatasan akses pendanaan, kebijakan yang berubah setiap pergantian pemerintah, peraturan tenaga kerja pun menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompleks.¹⁰

Dalam estimasi World Bank pada Oktober 2010, pada 2010 daftar GDP (*Gross Domestic Product*) perkapita negara-negara ASEAN dalam *US Dollar* : Indonesia: 4,380, Malaysia: 14,603, Thailand: 8,643, Singapura: 57,238,

¹⁰ Ina Primiana, "Siapkah Memasuki Pasar Bebas Asean 2015", harian *Pikiran Rakyat*, Rabu 25 Februari 2009

Philipina: 3,725, Brunei Darussalam: 42,200, Vietnam: 3,123, Laos: 2,435, Myanmar: 1,246, dan Kamboja: 2,086.¹¹

Kerjasama Ekstern ASEAN

Potensi peningkatan GDP yang positif bagi ASEAN, apabila melakukan FTA dengan negara-negara di Asia Timur, dapat dipahami mengingat peningkatan volume perdagangan yang mungkin tercipta melalui upaya perluasan kerjasama kawasan pasar bebas ASEAN dengan mitra dagang utamanya di Asia. Pasar China yang berpenduduk 1.2 milyar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa berhenti selama 10 tahun terakhir ini akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Demikian juga Jepang dengan penduduk sekitar 120 juta jiwa dan tingkat pendapatan yang sangat tinggi, menjadi tempat yang potensial bagi pemasaran produk-produk ekspor ASEAN.

Negara-negara ASEAN dan China sudah menjalin hubungan perdagangan yang erat sejak berabad-abad yang silam. Tiga negara di Asean yaitu Myanmar, Laos dan Vietnam berbatasan secara langsung dengan China. Pada awalnya, negara-negara ASEAN mengeksport produk rempah-rempah ke Cina dan mengimpor sutera dan bahan pakaian dari China. Saat ini, pola perdagangan mengalami perubahan, dimana ASEAN mengeksport produk elektronik, minyak

¹¹ "Pendapatan Perkapita negara ASEAN", <http://www.anneahira.com/pendapatan-perkapita-negara-asean.htm> diakses tanggal 27 November 2012

mentah, minyak dan lemak nabati, karet alam, dan sebagainya serta mengimpor produk-produk elektronik, produk kimia, tekstil, seng dari China.

Perdagangan ASEAN-China mengalami puncak pada tahun 2000 dengan total US\$. 61.5 milyar dan kemudian menurun menjadi US\$. 42.7 milyar tahun 2002. Singapura adalah negara ASEAN yang memiliki perdagangan terbesar dengan China diikuti dengan Malaysia dan Thailand.

Kesepakatan ASEAN-China FTA ditandatangani tahun 2002 di Kamboja dimana disepakati untuk mewujudkan ASEAN-China FTA pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand) dan 2015 untuk ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Dalam rangka memperlancar kerjasama ASEAN-China ini, disepakati juga implementasi Early Harvest Program (EHP) yaitu melakukan liberalisasi dini untuk produk pertanian selambat-lambatnya 2007 dan dimulai awal 2004.

Rencana liberalisasi perdagangan antara ASEAN dengan Jepang juga telah disepakati pada tahun 2003 di Bali dengan istilah ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership (CEP). economic partnership ini mencakup liberalisasi di - bidang barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, dan kerjasama di bidang ekonomi. Target waktu pencapaian ASEAN-Jepang CEP belum ditetapkan, tetapi disepakati untuk segera melakukan negosiasi pada awal tahun 2004 dan selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2005.

Sedikit berbeda dengan pola ASEAN-China FTA dan ASEAN-India FTA, ASEAN-Jepang CEP akan dilaksanakan secara bilateral. Hal ini disebabkan pihak

Jepang melihat tingkat kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN dalam melaksanakan CEP berbeda-beda. Singapura dan Jepang sudah menandatangani bilateral FTA pada tahun 2001, atau dua tahun sebelum disepakatinya ASEAN-Jepang CEP.

Prosedur penyelesaian bilateral FTA ini adalah melalui tahapan diskusi intensif, studi bersama, dan negosiasi. Pada saat ini Jepang sedang melakukan negosiasi secara bilateral dengan Thailand, Malaysia dan Philipina dalam mencapai bilateral FTA. Sedangkan antara Jepang dengan Indonesia, status pada saat ini belum pada tahap negosiasi masih dalam tahap diskusi intensif menuju negosiasi pembentukan FTA.

Perdagangan ASEAN dengan India terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2002. Malaysia merupakan negara mitra dagang utama India di ASEAN, diikuti Singapura dan Indonesia. Produk ekspor utama ASEAN ke India adalah minyak nabati, petroleum, produk elektronik, benang, tekstil dan tembaga. Sedangkan produk impor utama ASEAN dari India adalah produk elektronik, makanan ternak, batu-batuan, permata dan gandum.

Pertemuan Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN dan PM India di Bali tahun 2003, dengan target mencapai terbentuknya perdagangan bebas pada tahun 2011 untuk ASEAN-5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), tahun 2016 untuk Philipina dan tahun 2017 untuk ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). ASEAN-India sepakat untuk membentuk ASEAN-India Trade and Investment AREA (RTIA). Tujuan RTIA ASEAN-India adalah :

- Memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan
- Liberalisasi dan promosi perdagangan barang, jasa dan investasi
- Memperluas bidang-bidang baru yang mengembangkan kerjasama
- Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif untuk negara anggota ASEAN baru (Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam),
- Menjambatani kesenjangan pembangunan dan ekonomi diantara para anggotanya.

Adapun tujuan jangka panjang ASEAN-India adalah mewujudkan kawasan perdagangan bebas (Free Trade AREA/FTA) atau ASEAN-India FTA, yang akan diperluas mencakup bidang perdagangan barang, jasa dan investasi serta meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN-India secara berkesinambungan.

AANZ-FTA merupakan FTA regional yang bersifat komprehensif yang menggunakan pola *single undertaking*. AANZ-FTA perlu dilihat sebagai sebuah paket komprehensif yang menawarkan tidak saja tantangan di sektor tertentu, tetapi juga manfaatnya secara lintas sektoral dan peluang kerjasama bilateral yang dirintis selama perundingan yang mencakup sektor-sektor yang sensitif bagi Indonesia

Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya *Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya tertuang *Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area*.

Hal tersebut dilanjutkan dengan proses negosiasi *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area* (AANZ-FTA) yang dimulai pada awal tahun 2005. Setelah melalui 15 putaran perundingan, Persetujuan *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area* diselesaikan pada bulan Agustus 2008.

Untuk kemudian Persetujuan *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area* ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand.

Persetujuan AANZFTA terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran, yang mencakup:

Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, ROO, Customs, SPS, TBT, *Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerjasama Ekonomi, DSM, *ecommerce*. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi antara negara-negara anggota. Meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.

ASEAN-Korea Free Trade Area (AkFTA) merupakan kesepakatan antara negaranegara anggota ASEAN dengan Korea untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama

ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea.

Pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada bulan Nopember 2004 di Vientiane, Laos para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea menyepakati “*Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area*” sebagai landasan hukum bagi pembentukan ASEAN dan Korea FTA Framework Agreement dan Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTA selanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Persetujuan Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea.

AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang komprehensif dengan telah ditandatanganinya persetujuan-persetujuan dibidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negaranegara

anggota. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

Meningkatnya akses pasar produk ekspor nasional ke Korea Selatan dengan tingkat tarif yang relatif rendah dan pasar yang luas. Meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis”. Meningkatnya ekspor produk unggulan Indonesia dalam menjangkau peluang pasar Korea. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara. Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea akan meningkat per implementasi akibat penghapusan tarif 70% pos tarif Korea dalam *Normal Track*. Produk-produk yang akan dihapuskan tarifnya pada waktu implementasi, antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, produk kayu dan sebagainya.